

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu kelompok individu yang hidup bersama dalam satu negara dengan sistem yang sama, memiliki tujuan bersama, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain antar individu-individu yang ada dalam kelompok tersebut. Istilah "Masyarakat" sendiri berasal dari bahasa Arab "musyarakat" dan menggambarkan sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain. Artinya, seseorang tidak dapat hidup secara mandiri tanpa keberadaan orang lain di sekitarnya. Berikut ini pengertian masyarakat menurut Soeharto, yakni:

“Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, dan kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama”. (Suharto, 2010:47)

Berdasarkan pengertian diatas, menyebutkan bahwa masyarakat sebagai suatu entitas yang terdiri dari individu-individu yang memiliki kesamaan perasaan, identitas, dan kepentingan yang saling berbagi. Masyarakat merupakan tempat di mana orang-orang dengan perasaan dan identitas serupa berkumpul dan saling berinteraksi. Mereka merasa memiliki keterikatan emosional dan memiliki kepentingan yang sama dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama.

Masyarakat merupakan suatu kesatuan manusia yang berinteraksi satu sama lain menurut suatu sistem moral tertentu yang dengan sendirinya merepresentasikan makna dan identitas bersama yang berkesinambungan dan saling berhubungan (Koentjaraningrat, 2000:144). Berdasarkan pengertian diatas bahwa masyarakat sebagai entitas yang terdiri dari manusia yang saling berinteraksi. Masyarakat tidak hanya terdiri dari individu-individu yang hidup berdampingan, tetapi juga melibatkan sistem moral yang menjadi landasan bagi interaksi mereka. Sistem moral ini mengatur nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip yang diakui dan diikuti oleh anggota masyarakat. Menurut Alimandan dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Alimandan memberikan penjelasan tentang masyarakat sebagai berikut:

“Pengertian masyarakat dengan istilah *community*, dimana istilah tersebut menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa hingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok itu disebut masyarakat”. (Alimandan, 1985:3)

Berdasarkan pengertian diatas bahwa pengertian masyarakat dengan istilah "*community*" pada sekelompok warga di desa, kota, suku, atau bangsa. Jika anggota-anggota kelompok tersebut hidup bersama dalam cara yang membuat mereka merasa bahwa kelompok tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidup yang paling penting, maka kelompok tersebut disebut masyarakat. Pernyataan tersebut juga terdapat pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yakni:

“Masyarakat adalah sejumlah pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara

langsung maupun tidak langsung”. (UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)

Berdasarkan pengertian diatas bahwa masyarakat adalah sejumlah pihak yang terdiri dari individu, kelompok, dan badan hukum, yang berperan sebagai penerima manfaat pelayanan publik dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut konsep masyarakat menurut Suharto yakni:

“Masyarakat adalah arena dimana praktek pekerjaan *social* makro beroperasi. Berbagai definisi mengenai masyarakat biasanya diterapkan berdasarkan konsep ruang, orang, interaksi dan identitas. Dalam arti sempit istilah masyarakat merujuk pada sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu seperti desa, kelurahan, kampung atau rukun tetangga. Dalam arti luas, masyarakat menunjuk pada interaksi kompleks sejumlah orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama meskipun tidak bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu. Masyarakat seperti ini bisa disebut sebagai *society*. Misalnya masyarakat ilmuwan, masyarakat bisnis, masyarakat global dan masyarakat dunia”. (Suharto, 2006:3)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa masyarakat dalam arti sempit merujuk pada sekelompok orang yang tinggal di wilayah terbatas dan berinteraksi satu sama lain. Sedangkan masyarakat dalam arti luas mengacu pada orang-orang yang tidak terikat pada wilayah tertentu, namun memiliki kepentingan dan tujuan bersama dalam berbagai aspek. Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan yang mempunyai ciri-ciri. Berikut ini ciri-ciri masyarakat menurut Soekanto, masyarakat pada umumnya memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang
2. Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
3. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan

4. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain.

(Soekanto, 2006:22)

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa masyarakat terbentuk oleh kelompok manusia yang hidup bersama dan saling berinteraksi, saling membantu satu sama lain. Melalui interaksi tersebut, terbentuk kebiasaan-kebiasaan khas yang akhirnya membentuk kebudayaan yang unik dan khas bagi masyarakat tersebut. Pendapat lain mengenai ciri-ciri masyarakat diungkapkan oleh Herabudin sebagai berikut:

“Beberapa ciri-ciri umum masyarakat antara lain hidup bersama dan bergaul dengan kurun waktu yang cukup lama, sebuah sistem hidup bersama, dan individu-individu dalam masyarakat sadar bahwa dirinya merupakan satu kesatuan”. (Herabudin, 2015: 74)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa beberapa ciri umum masyarakat adalah kehidupan bersama dan bergaul dalam jangka waktu yang lama, adanya sistem kehidupan bersama, serta kesadaran individu bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Ciri-ciri ini mencerminkan pentingnya interaksi sosial, kerjasama, dan rasa saling ketergantungan dalam membentuk masyarakat.

2.1.2 Partisipasi

Partisipasi merupakan wujud peran aktif dari masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan pembangunan masyarakat. Hal ini juga diungkapkan oleh Andriani sebagai berikut:

“Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama”. (Andriani, 2018:112)

Berdasarkan penjelasan dijelaskan bahwa partisipasi mencakup aktifitas seperti berinteraksi sosial. Seseorang bisa berpartisipasi dengan mengambil bagian dalam kegiatan kelompok, berkomunikasi, berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta berusaha mencapai tujuan bersama. Dalam partisipasi, individu juga bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil bersama kelompok. Selanjutnya Zamroni juga mengemukakan definisi partisipasi sebagai berikut:

“Partisipasi merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum”. (Zamroni, 2011:51)

Berdasarkan pengertian diatas dijelaskan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan semua anggota masyarakat dalam pembentukan dan pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum. Ini menunjukkan bahwa partisipasi merupakan hak dan tanggungjawab setiap individu dalam berkontribusi dalam proses demokratis dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat dan negara. Pengertian lain mengenai partisipasi juga diungkapkan oleh I Nyoman Sumaryadi sebagai berikut:

“Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal

dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan”. (Sumaryadi, 2010: 46)

Berdasarkan pengertian diatas dijelaskan bahwa partisipasi ketika seseorang atau sekelompok orang turut serta dalam pembangunan dengan cara memberikan kontribusi seperti pendapat, usaha, waktu, keahlian, uang, atau sumber daya lainnya. Mereka juga ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil dari pembangunan tersebut. Dengan berpartisipasi, mereka memiliki peran aktif dalam proses pembangunan dan berusaha untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat beberapa macam partisipasi yang diungkapkan oleh para ahli , menurut Sundariningrum mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya yaitu:

1. Partisipasi langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi.
 2. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.
- (dalam Sugiyah , 2010:38)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dengan adanya kedua macam partisipasi ini, masyarakat dapat mengaktifkan berbagai bentuk keterlibatan dan memperkuat demokrasi serta partisipasi yang lebih inklusif. Keterlibatan langsung maupun tidak langsung memberikan peluang bagi individu untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan dan mempengaruhi perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.

2.1.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat memiliki peranan yang penting dalam mencapai keberhasilan dan kelangsungan program pembangunan. Partisipasi berarti aktifnya

seseorang atau kelompok dalam terlibat dalam suatu kegiatan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bayanana yang mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dimana masyarakat ikut serta terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan”. (Bayanana, 2021:14)

Berdasarkan penjelasan menurut Bayanana menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima manfaat, tetapi juga terlibat secara langsung mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan, pembangunan, perumusan kebijakan, hingga pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat ini memberikan peluang bagi mereka untuk berperan aktif, memberikan kontribusi, serta memiliki pengaruh dalam proses pembangunan yang melibatkan kehidupan dan kepentingan masyarakat. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Rohmawati yang mengemukakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana berperan sebagai sarana bagi masyarakat itu sendiri baik secara individu, kelompok masyarakat ataupun organisasi masyarakat dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingan sehingga proses kebijakan daerah yang akan ditetapkan lebih condong terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri”. (Rohmawati, 2021:27)

Berdasarkan pendapat diatas bahwa keterlibatan masyarakat, menjadi wadah bagi individu, kelompok, dan organisasi untuk mengemukakan kebutuhan dan kepentingan mereka pada pengembangan kebijakan daerah yang lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat, memastikan bahwa proses tersebut mempertimbangkan dan mengakomodasi beragam kebutuhan masyarakat.

Pengertian yang berbeda tentang partisipasi masyarakat dikemukakan pula oleh Isbandi yang menjelaskan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi”. (dalam Andreeyan, 2014:1940)

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa partisipasi masyarakat melibatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengenali masalah dan potensi yang ada di lingkungan mereka, serta berperan dalam pemilihan dan pengambilan keputusan terkait solusi alternatif untuk menangani masalah tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat juga melibatkan tindakan nyata dalam pelaksanaan upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, masyarakat juga terlibat dalam proses evaluasi untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan, sehingga mereka dapat terus berpartisipasi dalam pembangunan dan perubahan yang berkelanjutan. Pendapat lain menurut Walgito mengatakan hubungan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang erat antara individu satu dengan individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat maka setiap kegiatan pembangunan akan kurang berhasil”. (dalam Furnanda, 2012:36)

Berdasarkan pendapat di atas partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk hubungan yang saling terkait antara individu-individu dalam masyarakat. Hal ini mencakup hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting

dalam keberhasilan kegiatan pembangunan. Tanpa partisipasi masyarakat, upaya pembangunan akan menghadapi berbagai hambatan dan kemungkinan hasilnya akan kurang optimal. Selain itu Mulyadi juga menyebutkan pengertian partisipasi masyarakat sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program, dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka”. (Mulyadi, 2019:14)

Berdasarkan pengertian diatas dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi program atau kebijakan, dengan tujuan memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan yang dapat diukur dari beberapa indikator. Menurut Arnstein partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi 8 tingkatan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai setiap tingkatan tersebut:

1. Kontrol masyarakat (*citizen control*) dimana dalam tingkatan ini masyarakat memiliki kontrol dalam segala aspek.
2. Pelimpahan kekuasaan (*delegated power*), dalam tingkatan ini pembuat keputusan secara dominan berada pada pihak masyarakat.
3. Kemitraan (*partnership*), terdapat kesepakatan bersama dalam tahap perencanaan dan tanggung jawab pembuatan keputusan
4. Penenteraman (*placation*), pada tingkatan ini masyarakat memiliki tingkat pengaruh yang jelas terlihat namun pada pelaksanaannya bergantung pada pemerintah
5. Konsultasi (*consultation*), masyarakat hanya diberi kesempatan untuk memberikan pendapat mereka namun tidak diberikan kepastian bahwa pendapat masyarakat akan dipertimbangkan
6. Informasi (*information*), masyarakat hanya diberikan informasi satu arah tanpa diberikan ruang untuk memberikan umpan balik kepada pemerintah.
7. Terapi (*therapy*), tingkatan ini hanya pemberian proposal kepada masyarakat

8. Manipulasi (*manipulation*), pada tingkatan ini masyarakat tidak terlibat apapun hanya digunakan sebagai alat untuk kepentingan.
(dalam Azhari, 2011:42-43)

Berdasarkan uraian diatas bahwa partisipasi masyarakat memiliki tingkatan yang bervariasi, mulai dari kontrol penuh hingga manipulasi. Tingkatan tersebut mencakup kontrol masyarakat, pelimpahan kekuasaan, kemitraan, penenteraman, konsultasi, informasi, terapi, dan manipulasi. Penting untuk mendorong partisipasi yang lebih tinggi dan adil guna memastikan keterlibatan yang efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

2.1.4 Jenis Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa jenis partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan yang memerlukan kesukarelaan dalam melakukan partisipasi. Cohen dan Uphoff membagi partisipasi menjadi empat jenis yaitu:

1. *Participation in Decision Making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan)
 2. *Participation in Implementation* (Partisipasi dalam pelaksanaan)
 3. *Participation in Benefits* (Partisipasi dalam kemanfaatan)
 4. *Participation in Evaluation* (Partisipasi dalam evaluasi)
- (Cohen dan Uphoff, 1980:8)

Berdasarkan uraian diatas, bahwa partisipasi yang diberikan masyarakat dilihat dari empat jenis partisipasi tersebut, dimana setiap jenis partisipasi harus saling berhubungan. Keempat jenis partisipasi ini saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Ketika masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, hal itu akan mempengaruhi bagaimana proyek dilaksanakan. Pelaksanaan yang baik akan berdampak pada manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. Evaluasi yang

dilakukan akan mempengaruhi pengambilan keputusan di masa depan. Penjelasan sebagai berikut:

1. *Participation in decision making, specifically, this kind of participation centres on the generation of ideas, the formulation and assessment of options, and making choices about them, including the formulation of plans for putting selected options into effect.*
2. *Participation in implementation, people can participate in the implementation, people can participate in the implementation can take a variety of forms, such as the provision of labour, cash, material goods, and information.*
3. *Participation in benefits, enlistment in a project can lead to at least three kinds of possible benefits: (1) material; (2) social; and (3) personal.*
4. *Participation in evaluation, There appear to be three main activities through which rural people can participate in project evaluation. The community conducts activity reviews and can voice complaints and suggestions.*

(Cohen dan Uphoff, 1980:8-11)

Participation in decision making atau Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan, Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan, Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena yang di ambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan dengan menghadiri rapat dan mengemukakan pendapat.

Participation in implementation atau partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dari rencana yang telah disetujui sebelumnya. Dalam hal ini Cohen dan Uphoff menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara memberikan kontribusi yang berguna

untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, baik berupa tenaga, dan material, maupun informasi yang dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan.

Participation in benefits atau partisipasi dalam kemanfaatan, partisipasi ini tidak terlepas pada kualitas dan kuantitas hasil implementasi program yang dapat dicapai. Dalam hal kualitas, keberhasilan suatu program dapat dilihat dari peningkatan output yang terjadi, sedangkan dari segi kuantitas, penting untuk melihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang telah dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam menikmati manfaat dapat diamati dari tiga aspek, yaitu manfaat materi, manfaat sosial, dan manfaat pribadi.

Participation in evaluation atau Partisipasi dalam evaluasi, Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang ditetapkan atau ada penyimpangan. Penilaian dilakukan secara langsung seperti peninjauan kegiatan dan secara tidak langsung dengan cara memberikan saran atau kritik.

Sedangkan menurut Huraerah dalam menguraikan beberapa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Partisipasi buah pikiran yang diberikan partisipan dalam anjang sono, pertemuan atau rapat.
2. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
3. Partisipasi harta benda dalam bentuk memberikan bantuan harta benda pada berbagai kegiatan untuk memperbaiki atau membangun prasarana, serta memberikan bantuan pada orang lain seperti uang dan makanan.
4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran dalam bentuk menggunakan keterampilan dan kemahiran untuk mendorong berbagai bentuk usaha.

5. Partisipasi Sosial dalam bentuk menunjukkan kebersamaan dan keguyuban pada lingkungan sosial.
(Huraerah, 2011:116)

Berdasarkan pendapat diatas menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi penting dalam membangun kerjasama, mengoptimalkan sumber daya, dan meningkatkan kualitas hidup dalam suatu masyarakat. Dengan adanya partisipasi ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pembangunan dan memberikan kontribusi yang beragam sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Selanjutnya partisipasi menurut Chapin mengemukakan adanya bentuk partisipasi masyarakat, antara lain:

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
3. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
4. Partisipasi representatif. Partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.
(dalam Tomasolo, 2015:35)

Berdasarkan bentuk partisipasi diatas, bentuk-bentuk partisipasi ini penting dalam membangun keterlibatan masyarakat, memperkuat demokrasi, dan mendorong keberlanjutan program-program yang ada. Melalui partisipasi ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi, memberikan masukan, dan merasa memiliki tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

2.1.5 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Menurut Plumer menyebutkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk terlibat dalam proses partisipasi, yaitu:

1. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada
2. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.
3. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
4. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan
5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

(dalam Yulianti, 2012:10)

Sedangkan menurut Angell mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu :

1. Usia orang dengan usia menengah keatas cenderung lebih banyak berpartisipasi dari pada kelompok usia lain.
2. Jenis kelamin kebiasaan dalam bangsa kita peranan perempuan hanya mengurus rumah tangga sehingga hal ini mengakibatkan lelaki lebih banyak memiliki waktu berpartisipasi dalam setiap program.
3. Pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi.

4. Pekerjaan dan penghasilan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup dapat mendorong untuk berpartisipasi.
 5. Lamanya tinggal dan lamanya seseorang tinggal serta lamanya seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat partisipasinya.
- (dalam Lisdiana, 2013:9)

Berdasarkan pendapat diatas dijelaskan bahawa beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, serta lamanya tinggal dan interaksi dengan lingkungan. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi ketersediaan waktu, pengetahuan, sumber daya, dan motivasi yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan.

2.1.6 Sampah

Secara umum, sampah dapat didefinisikan sebagai material yang dianggap sebagai buangan yang tidak disukai atau diinginkan oleh orang-orang. Sebagian besar sampah terdiri dari bahan atau sisa yang tidak lagi digunakan dan memiliki potensi mengganggu kesehatan masyarakat dan lingkungan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Hal ini dikemukakan juga oleh Sucipto mengenai sampah sebagai berikut:

“Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puingan bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan dari aktifitas manusia yang sudah terpakai”. (Sucipto, 2012:1)

Dari penjelasan di atas bahwa sampah adalah benda dalam bentuk padat, cair, atau gas yang telah ditinggalkan atau dibuang oleh manusia atau alam dan tidak memiliki nilai ekonomis. Adapun jenis-jenis sampah menurut Menurut Kuncoro Sejati terdapat tiga kategori utama untuk jenis sampah, yaitu sampah organik/basah, sampah anorganik/kering, dan sampah berbahaya. Lebih rinci, penjelasan tentang masing-masing jenis sampah tersebut sebagai berikut:

1. Sampah organik/basah
Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayur, sisa buah, dan lain-lain. Sampah jenis ini dapat terdegradasi (membusuk/hancur) secara alami.
2. Sampah anorganik/kering
Sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya adalah logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan lain-lain.
3. Sampah berbahaya
Sampah jenis ini berbahaya bagi manusia. Contohnya adalah baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir, dan lain-lain. Sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus.
(Sejati, 2009: 15)

Berdasarkan uraian di atas bahwa Penting untuk memahami jenis-jenis sampah ini agar dapat mengadopsi praktik pengelolaan sampah yang tepat, seperti pemilahan sampah, daur ulang, dan penanganan yang aman. Dengan kesadaran akan jenis sampah yang dihasilkan, masyarakat dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pendapat lain mengenai jenis sampah juga diungkapkan oleh Sucipto pemilahan sampah ini di mulai dari rumah tangga, rumah makan, hotel, industri dan lainnya. Pemilahan sampah ini di bagi menjadi tiga yaitu sampah organik, anorganik dan B3, sebagai berikut:

1. Sampah organik

Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sampah organik di bagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) sampah organik basah, dan (2) sampah organik kering. Sampah organik basah mempunyai kandungan air yang cukup tinggi. Contohnya kulit buah dan sisa sayuran. Sedangkan sampah organik kering adalah bahan organik lain yang kandungan airnya rendah. Contohnya serbuk kayu, kayu, ranting pohon dan dedaunan kering.

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik bukan berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.

3. Sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun)

Sampah B3 merupakan jenis sampah yang dikategorikan beracun dan berbahaya bagi manusia. Umumnya, sampah jenis ini mengandung merkuri seperti kaleng bekas cat semprot atau minyak wangi.

(Sucipto 2012:2-3)

Berdasarkan uraian diatas bahwa Sampah organik terdiri dari sisa-sisa makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ada dua jenis sampah organik: basah (kulit buah, sisa sayuran) dan kering (serbuk kayu, kayu, ranting pohon, dedaunan kering). Sampah anorganik terdiri dari bahan seperti plastik, logam, kaca, dan kertas. Sampah B3 adalah jenis sampah beracun dan berbahaya yang mengandung zat seperti merkuri di kaleng cat semprot atau minyak wangi.

Menurut Chandra ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah sampah, adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk, Jumlah penduduk tergantung pada aktivitas dan kepadatan penduduk. Semakin padat penduduk, sampah semakin menumpuk karena tempat atau ruang untuk menampung sampah kurang. Semakin meningkat aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan semakin banyak, misalnya pada aktivitas pembangunan, perdagangan, industri, dan sebagainya.
2. Sistem pengumpulan atau pembuangan sampah yang dipakai. Pengumpulan sampah dengan menggunakan gerobak lebih lambat jika dibandingkan dengan truk.
3. Pengambilan bahan-bahan yang ada pada sampah untuk dipakai kembali. Metode itu dilakukan karena bahan tersebut masih memiliki nilai ekonomi bagi golongan tertentu. Frekuensi pengambilan dipengaruhi oleh keadaan, jika harganya tinggi, sampah yang tertinggal sedikit

4. Letak geografi, Lokasi tempat pembuangan apakah di daerah pegunungan, lembah, pantai atau dataran rendah.
 5. Faktor waktu, Bergantung pada faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jumlah sampah perhari bervariasi menurut waktu. Contoh, jumlah sampah pada siang hari lebih banyak dari pada jumlah di pagi hari, sedangkan sampah di daerah pedesaan tidak begitu bergantung pada faktor waktu.
 6. Faktor sosial ekonomi dan budaya. Contoh, adat-istiadat dan taraf hidup dan mental masyarakat.
 7. Pada musim hujan, sampah mungkin akan tersangkut pada selokan, pintu air, atau penyaringan air limbah.
 8. Kebiasaan masyarakat. Contoh, jika seseorang suka mengonsumsi satu jenis makanan atau tanaman, sampah makanan itu akan meningkat.
 9. Kemajuan teknologi. Akibat kemajuan teknologi, jumlah sampah dapat meningkat. Contoh, plastik, kardus, rongsokan, AC, TV, kulkas, dan sebagainya.
 10. Jenis sampah Makin maju tingkat kebudayaan suatu masyarakat, semakin kompleks pula macam dan jenis sampahnya.
- (Chandra, 2006:112-113)

Berdasarkan uraian diatas bahwa faktor-faktor seperti jumlah penduduk, sistem pengumpulan sampah, daur ulang, letak geografis, waktu, sosial ekonomi, budaya, musim, kebiasaan masyarakat, teknologi, dan jenis sampah mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan. Penting untuk menyadari perlunya pengelolaan sampah yang efektif dan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatifnya demi keberlanjutan lingkungan. Pendapat lain mengenai faktor yang mempengaruhi sampah baik kualitas maupun kuantitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor yang penting yang mempengaruhi jumlah sampah antara lain:

1. Jumlah Penduduk
Ada kecenderungan semakin banyak jumlah penduduk semakin banyak pula sampah yang dihasilkan maka dari itu, pengelolaan sampah tentunya harus disesuaikan dengan lajunya pertumbuhan penduduk.
2. Keadaan Sosial Ekonomi
Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak jumlah perkapita sampah yang akan dihasilkan. Jenis (anorganik) sampahnya pun semakin banyak bersifat tidak dapat membusuk. Perubahan jenis sampah ini, tergantung pada bahan

yang tersedia, peraturan yang berlaku, serta kesadaran masyarakat akan persoalan sampah. Kenaikan tingkat kesejahteraan ini pun akan meningkatkan pertambahan kegiatan konstruksi dan pembaharuan bangunan-bangunan, produk pertanian, industri dan lain sebagainya yang ini semua memiliki konsekuensi bertambahnya volume dan jenis sampah.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula.

4. Tingkat Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu lingkungan, pendidikan mempunyai peranan penting karena melalui pendidikan, manusia makin mengetahui dan sadar akan bahaya limbah terhadap lingkungan, terutama bahaya pencemaran terhadap kesehatan manusia dan dengan pendidikan dapat ditanamkan berpikir kritis, kreatif, dan rasional bagaimana cara pengolahan limbah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

(Slamet, 2009: 21)

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Semakin banyak penduduk, semakin banyak sampah, pengelolaan sampah perlu disesuaikan dengan pertumbuhan penduduk. Tingkat sosial ekonomi yang tinggi berhubungan dengan peningkatan sampah per individu, terutama sampah anorganik yang sulit terurai. Perubahan jenis sampah bergantung pada bahan, peraturan, dan kesadaran masyarakat. Peningkatan kesejahteraan berkontribusi pada peningkatan volume dan jenis sampah. Kemajuan teknologi meningkatkan jumlah dan kualitas sampah. Pendidikan penting untuk kesadaran dan pemahaman limbah, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi kesadaran dan kemampuan pengelolaan sampah.

2.1.7 Pemerintah

Pemerintah disebut juga penyelenggara negara. Secara umum, pemerintah dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok individu yang memiliki kekuasaan

dan kewenangan untuk mengatur suatu negara. Pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan merupakan proses pemerintah mengatur kekuasaan dalam suatu negara (Napitupulu, 2012:9). Pemerintah adalah anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya (Syafiie, 2010:11). Hal ini juga diungkapkan oleh Talidzu Ndraha mengenai pemerintah sebagai berikut:

“Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan pada saat yang diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah”. (Ndraha, 2011:6)

Berdasarkan pengertian diatas bahwa Pemerintah adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sipil kepada setiap individu melalui hubungan pemerintahan ketika dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan atau harapan yang ada. Selain itu Budiarjo juga mengemukakan definisi pemerintah sebagai berikut:

“Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut”. (Budiarjo, 2003:21)

Berdasarkan pengertian diatas bahwa Pemerintah merupakan serangkaian kegiatan yang terorganisir, yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, dengan landasan pada dasar Negara, rakyat atau penduduk, dan wilayah suatu

negara. Menurut Taliziduhu Ndraha, terdapat dua jenis fungsi pemerintah yang dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Fungsi primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

(Ndraha, 2000, 78)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa fungsi primer pemerintah terutama berkaitan dengan penyediaan layanan publik yang tidak bisa diambil alih oleh sektor swasta. Sementara itu, fungsi sekunder pemerintah mencakup usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah sendiri karena sumber daya yang terbatas.

2.1.8 Pemerintahan

Pemerintahan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Pengertian pemerintahan juga diungkapkan oleh Inu Kencana Syafie sebagai berikut:

“Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam

mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri”. (Syafiie, 2011:10)

Berdasarkan pengertian diatas bahwa pemerintahan sebagai kelompok orang-orang yang memiliki kemampuan, integritas, dan keindahan dalam melakukan tugas-tugasnya. Pemerintahan dianggap mampu melakukan koordinasi yang efektif, memberikan kepemimpinan yang baik, serta menjalin hubungan pemerintah dan masyarakat, serta antara departemen dan unit yang ada di dalam struktur pemerintahan itu sendiri. Pendapat mengenai definisi pemerintahan diungkapkan juga oleh Labolo sebagai berikut:

“Pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan”. (Labolo, 2007:24)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Pemerintahan memiliki peran penting dalam mengelola kehidupan bersama dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama oleh masyarakat. Pendapat lain juga diungkapkan oleh Nia Karniawati mengenai pemerintahan sebagai berikut:

“Pemerintahan dikenal juga dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi eksekutif saja sebagai pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, dan yudikatif sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan”. (Karniawati, 2015:208)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pemerintahan mencakup tiga cabang pemerintahan ini penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara menyeluruh, yaitu mengatur, membuat peraturan, dan melaksanakan hukum.

Sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Utang Suwaryo yang membagi fungsi pemerintahan sebagai berikut:

“Fungsi dari suatu pemerintahan adalah pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya proses pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka dalam titik dan waktu tertentu keadaan masyarakat akan berubah”. (Suwaryo, 2010:22)

Pemerintahan memiliki peran penting dalam melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan terhadap masyarakat. Melalui proses pembangunan yang mencakup pengembangan untuk meningkatkan kondisi dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Sedarmayanti berpendapat bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menghormati kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok yang meliputi beberapa hal:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 2. Memajukan kesejahteraan umum
 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
 4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- (Sedarmayanti, 2004:9)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pemerintahan yang baik harus memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan semua keturunan bangsa Indonesia. Selain itu, pemerintahan juga harus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban umum, perdamaian abadi, serta mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.

2.1.9 Program Pemerintahan Kecamatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pemerintahan Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang memiliki wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kedudukan kecamatan dijelaskan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Jadi Kecamatan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan utama di Kecamatan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan semua urusan pemerintahan di wilayah tersebut. Selain itu, camat juga memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah dengan tetap menjalankan tugastugas pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat sebagai berikut:

“Kualitas pelayanan di Kecamatan diharapkan akan menjadi lebih baik setelah menjadi perangkat daerah sebab tujuan pemberian otonomi daerah dan keberadaan daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan dan penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien, ekonomis dan demokratis Secara sederhana kata pelayanan akibat adanya pelayan yang melayani. Kegiatan yang dilakukan pelayan tersebut dinamakan pelayanan. Dengan demikian ada dua istilah yang saling terkait, yaitu pelayanan dan melayani.” (Desi, 2020:6)

Pemerintah Kecamatan dalam menjalankan fungsi pelayanan, Pemerintah kecamatan merancang dan melaksanakan berbagai program. Program-program tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kecamatan. Melalui berbagai program pemerintah

kecamatan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan memerlukan program-program pada masyarakat sebagai upaya mewujudkan dan meningkatkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan sampah memiliki peraturan daerah yaitu peraturan Daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Bandung dalam menghadapi persoalan tentang sampah dengan meluncurkan program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung (DLHK) melalui metode *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) dalam menangani persoalan sampah di Kota Bandung.

Kecamatan Sukasari merupakan Kecamatan di Kota Bandung yang menerapkan program Kang Pis Man dengan menetapkan Keputusan Camat Sukasari No. 660.2/17-Kec. Sukasari 2018 tentang pembentukan unit bank sampah ceria dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat seluruh masyarakat Kota Bandung dalam pengurangan dan pemanfaatan sampah yaitu melalui kegiatan bank sampah yang bisa memberikan tambahan nilai ekonomi maupun sosial. Selain itu, tujuan lainnya adalah memanfaatkan sampah menjadi memiliki nilai ekonomi. Jenis pelayanan pada program bank sampah ceria yaitu pertama nasabah datang langsung ke kantor pelayanan program bank sampah ceria dengan membawa sampah yang akan di tabung.

Masalah yang terjadi pada bank sampah ceria belum berjalan efektif. Karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program bank sampah ceria, Selain itu, layanan yang saat ini diberikan di bank sampah ceria terbatas pada pemilahan dan penimbangan sampah saja, tanpa dilakukannya edukasi mengenai daur ulang pemanfaatan sampah.

Berdasarkan pemaparan diatas untuk mengkaji dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung, peneliti menggunakan teori Cohen dan Uphoff (1980) yang didalamnya terdapat empat jenis partisipasi yaitu: partisipasi dalam partisipasi dalam *decision making, implementation, benefits and evaluation*.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Partisipasi merupakan keterlibatan langsung masyarakat Kecamatan Sukasari dalam program bank sampah ceria.
2. Masyarakat merupakan warga yang terlibat dalam program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
3. Bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang yang memiliki nilai ekonomi.
4. Pemerintah Kecamatan Sukasari merupakan tingkat Pemerintahan yang membentuk program serta memegang peran penting dalam menjalankan program bank sampah ceria. Untuk melihat bentuk partisipasi masyarakat dilihat dalam indikator berikut:

- 1) Partisipasi dalam *decision making* pada program bank sampah ceria Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

Partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan menekankan pada keterlibatan masyarakat untuk hadir dalam pertemuan rapat dan mengemukakan pendapat untuk mendukung proses pengambilan keputusan terhadap program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

- a. Perencanaan merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
- b. Kehadiran rapat merupakan keterlibatan masyarakat untuk hadir dalam pertemuan rapat yang menunjukkan partisipasi terhadap program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
- c. Mengemukakan pendapat merupakan keterlibatan masyarakat dengan memberikan pendapat sebagai bentuk menyumbangkan ide dan pemikiran untuk untuk bahan pertimbangan keputusan terkait program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

- 2) Partisipasi dalam *implementation* pada program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dapat berupa dukungan dalam bentuk kontribusi tenaga, kontribusi uang dan kontribusi material pada program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

- a. Kontribusi tenaga merupakan keterlibatan masyarakat memberikan dukungan secara fisik, seperti membantu dalam proses kegiatan untuk menggerakkan peran serta masyarakat untuk berperan aktif dalam program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
 - b. Kontribusi material merupakan keterlibatan masyarakat memberikan berupa barang pada program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
 - c. Kontribusi informasi merupakan keterlibatan masyarakat memberikan kontribusi berupa informasi tentang keberadaan bank sampah ceria kepada masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.
- 3) Partisipasi dalam *benefits* pada program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

Partisipasi masyarakat dalam memberikan kemanfaatan program dalam dua aspek, yaitu manfaat materi, manfaat sosial dan manfaat pribadi yang dirasakan masyarakat yang terlibat dalam program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

- a. Manfaat materi merupakan bank sampah ceria memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat yang terlibat dalam program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
- b. Manfaat sosial merupakan bank sampah ceria memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah lingkungan di lingkungan mereka sendiri.

c. Manfaat pribadi merupakan bank sampah ceria memberikan peningkatan kesadaran lingkungan dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.

4) Partisipasi dalam *evaluation* pada program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam tahap evaluasi pelaksanaan program, dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan atau terdapat penyimpangan. Evaluasi melibatkan masyarakat dalam dalam peninjauan kegiatan serta menyampaikan keluhan dan saran terhadap program untuk meningkatkan pelaksanaan program bank sampah ceria Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

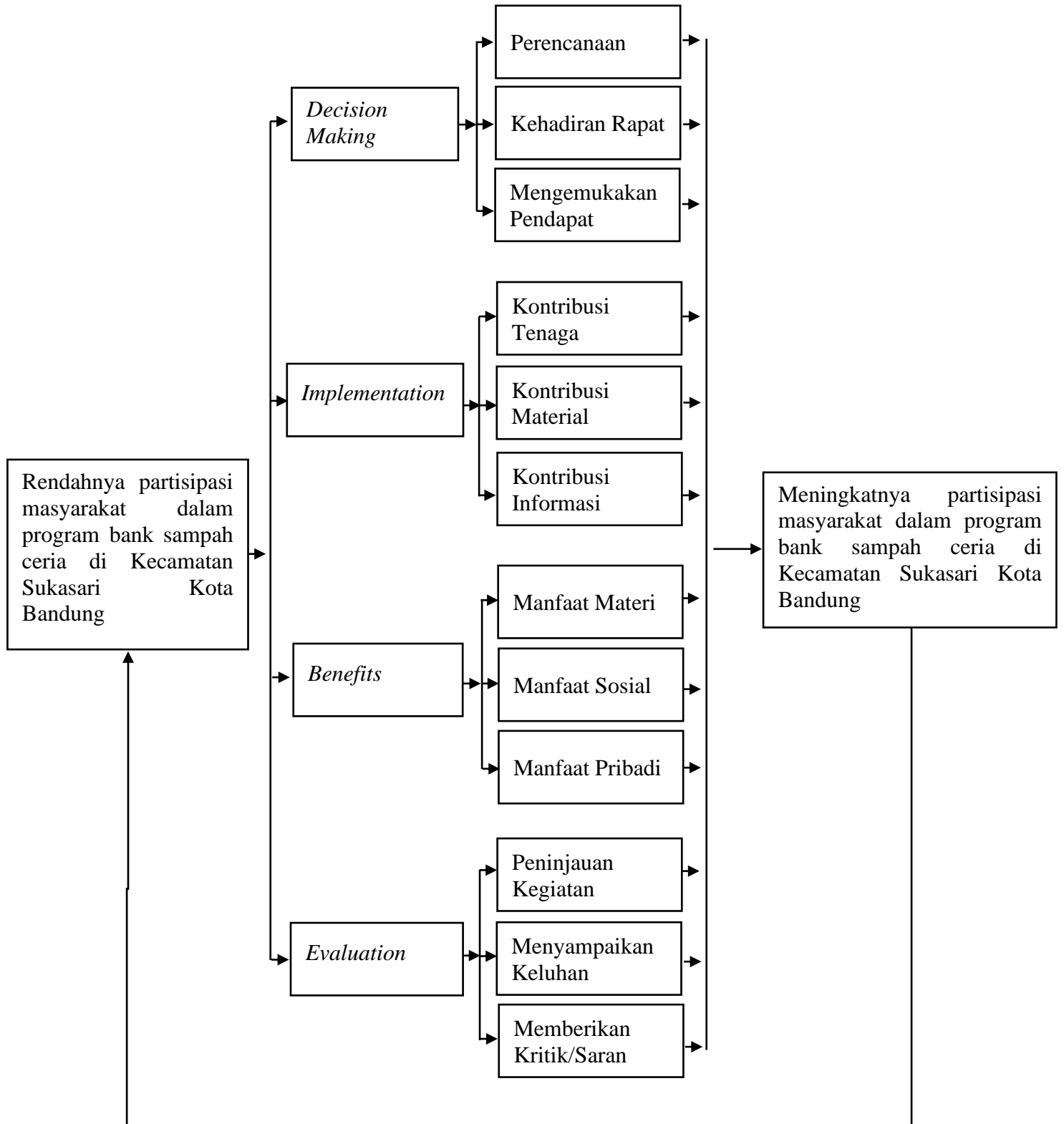
a. Melakukan peninjauan kegiatan merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif mengawasi dan mengikuti perkembangan program bank sampah ceria Kecamatan Sukasari Kota Bandung.

b. Menyampaikan keluhan merupakan keterlibatan masyarakat mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap layanan atau masalah yang terkait dengan operasional bank sampah ceria.

c. Memberikan saran atau kritik merupakan keterlibatan masyarakat memberikan saran atau kritik jika terdapat kelemahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pada program bank sampah ceria.

Berdasarkan uraian diatas, agar mempermudah peneliti memahami pokok-pokok setiap teori yang digunakan maka model kerangka pemikiran yang didasarkan atas pola pikir peneliti diuraikan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran



2.3 Proposisi

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka proposisi pada penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam program bank sampah ceria di Kecamatan Sukasari Kota Bandung dibuktikan dengan partisipasi dalam *decision making, implementation, benefits and evaluation*.